

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
180/PID.B/2019/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
SPET PERTANIAN”**

SKRIPSI

Oleh :

Miftakhul Arif Fajar Istigfari

NIM : C03213033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Miftakhul Arif Fajar Istigfari
NIM	: C03213033
Semester	: XIV
Jurusan/Prodi/Fakultas	: Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam/Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 180/Pid.B/Pn.Lmg tentang Tindak Pidana Pencurian Spet Pertanian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2020



Miftakhul/Arif Fajar Istigfari
NIM C03213033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Arif Fajar Istigfari NIM: C03213033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2020

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

Moh. Hatta, S.Ag, M.HI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Arif Fajar Istigfari NIM. C03213033 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIn Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji II,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, SH., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 30 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Arif Fajar Istigfari
NIM : C03213033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : pecintakopi21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ ☒ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 180/pid.B/2019/Pn.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Miftakhul Arif Fajar.I)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 180/Pid.b/2019/PN.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: yang pertama, bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian spet pertanian (dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.Lmg) dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian spet pertanian (dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.Lmg).

Data yang diperlukan dari penelitian ini dihimpun melalui kajian pustaka yang berasal dari berbagai sumber buku yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana islam.

Proses penelitian menemukan bahwa yang pertama Pertimbangan hakim dalam perkara yang bernomor 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg yang berisi tentang tindak pidana pencurian spet pertanian yang dilakukan oleh terdakwa Kharisun Arif bin Asro. Hakim menjerat terdakwa dengan pasal 362 KUHP. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kurungan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sekaligus harus membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian spet pertanian yang dilakukan oleh terdakwa Kharisun Arif bin Asro dalam putusan Nomor. 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg telah sesuai dengan konsep takzir dalam hal ini dikarenakan tindakan pencurian tersebut tidak memenuhi rukun sariqah pada nisab pencuriannya. Sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah diperbolehkan di Indonesia. Hal ini karena meresahkan masyarakat dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu ketegasan hukuman bagi siapapun yang melanggar agar dapat membuat efek jera bagi pelaku pencurian.

Maka hendaknya para hakim harus memiliki jiwa keadilan dan ketegasan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dapat melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap budi luhur sehingga dapat menghadirkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SAMPUL DALAM	ii
PERTNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian	11
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KONSEP *SARIQAH* (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Sariqah

1. Pengertian Sariqah	18
2. Macam-macam Sariqah	19
3. Unsur-unsur Sariqah	20

B. Tindak Pidana (Jarimah)

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah) 23
2. Syarat-syarat Tindak Pidana (Jarimah) 25

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan bermasyarakat ialah tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu gejala politik. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan adalah hasil dari proses politik yang menyangkut aturan-aturan yang melarang atau menyuruh masyarakat untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Proses inilah yang harus dipahami dalam mengkaji tentang kejahatan. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Tingkah laku manusia tidak akan bisa dilepaskan dari hukum. Hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam merealisasikan tujuan yang ada di dalam peraturannya. Tujuan hukum adalah melindungi seseorang dan tugasnya adalah memberikan hukuman kepada yang melanggar.

Setiap bagian dari lembaga hukum memiliki tugasnya masing-masing. Lembaga kepolisian bertugas menghadapi pelanggar hukum secara langsung, kejaksaan ada untuk memeriksa perkara dalam

perlindungan bagi terpidana, bukan hanya untuk alasan
perlindungan terhadap warga masyarakat serta terpidana agar
nyaman sehingga terwujud sebagai masyarakat yang be-
peran. Dengan demikian kegunaan dari hukum pidana
tidak hanya pemberian efek jera saja, akan tetapi juga berguna untuk
integrasi sosial, konsep inilah yang disebut dengan pen-
tegrasi sosial. Sebagai makhluk social, tentunya secara sadar

perlindungan bagi terpidana, bukan hanya untuk alasan
perlindungan terhadap warga masyarakat serta terpidana agar
nyaman sehingga terwujud sebagai masyarakat yang be-
nyaman. Dengan demikian kegunaan dari hukum pidana
tidak hanya memberikan efek jera saja, akan tetapi juga berguna untuk
integrasi sosial, konsep inilah yang disebut dengan pen-
tegrasi sosial. Sebagai makhluk social, tentunya secara sadar

perlindungan bagi terpidana, bukan hanya untuk alasan
perlindungan terhadap warga masyarakat serta terpidana agar
nyaman sehingga terwujud sebagai masyarakat yang be-
nyaman. Dengan demikian kegunaan dari hukum pidana
tidak hanya memberikan efek jera saja, akan tetapi juga berguna untuk
integrasi sosial, konsep inilah yang disebut dengan pen-
tegrasi sosial. Sebagai makhluk social, tentunya secara sadar

²Ibid. Hlm. 245

²Ibid. Hlm. 245

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang mana kedatangannya adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi, agama Islam sendiri adalah untuk mendidik manusia secara jasmani dan rohani. Intinya dalam Islam ada yang dinamakan dengan perbuatan baik dan buruk, yang mana setiap kebaikan akan diganjar dengan pahala dan setiap keburukan akan dibalas dengan siksa.⁵

Islam itu indah karena telah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek. Islam juga melindungi setiap harta yang dimiliki oleh penganutnya, sehingga seorang muslim akan merasa aman karena harta bendanya tidak akan bisa direbut orang lain. Artinya Islam tidak menghalalkan seseorang

⁵Harun Nasution, *Islam Rasional*. (Jakarta : Mizan, 1995) 10

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Islam telah mengharamkan perbuatan mencuri, korupsi, mencopet dan perbuatan mengambil hak milik orang lain lainnya, karena agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian yang ingin membangun umat yang sejahtera. Salah satu perbuatan yang menjadikan manusia merasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya tindak pidana pencurian. Sehingga sangat tidak adil apabila pelaku perbuatan pencurian ini mendapatkan hukuman yang ringan. Apalagi di era modern seperti ini, sudah sangat banyak modus pencurian yang muncul yang mana sangat berbeda dengan zaman dahulu baik dari segi kualitas dan macamnya.⁸ Sedangkan hukuman-hukamn yang terlalu ringan tidak akan bisa membuat pelaku jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.

⁸Nadhifuddin, Ahmad (2009) *Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern*. thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 5

Di dalam hukum positif, seseorang yang melakukan kejahatan dihukum berdasarkan sejauh mana kerugian yang diterima masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akal, karena jika akhlak terpelihara maka kesehatan badan akal dan ketentraman masyarakat juga akan terpelihara. Pelaku tindak pencurian biasanya terdesak oleh kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi, sehingga mereka dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Termasuk dengan cara mencuri.

Salah satu kasus pencurian yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian spet pertanian yang dilakukan oleh Kharisun Arif warga desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Kharisun Arif sengaja melakukan tindak pidana pencurian spet pertanian untuk di jual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kharisun Arif tidak hanya sekali melakukan pencurian, perbuatannya sudah meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam skripsi ini, penulis akan mengupas putusan di pengadilan Negeri Lamongan yang bernomorkan : 180/Pid.B/2019/PN.Lmg. Putusan ini berisi tentang terdakwa Kharisun Arif bin Asro yang mendapat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah mencuri spet pertanian milik saksi Sutari yang terletak di kandang ayam di dusun Kedungjati Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai kasus tindak pidana pencurian spet pertanian yang dilakukan oleh Kharisun Arif bin Asro penulis ingin mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga terdakwa mendapatkan hukuman yang telah disebutkan di atas yang mana tidak sesuai dengan *asas legalitas* serta bagaimana hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan ditinjau dari sisi hukum Islam atas kasus tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 180/Pid.b/2019/PN.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian”**.

Identifikasi masalah yang dapat ditemukan dari uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- [illegible]

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian spet pertanian (dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 180/Pid.B/2019/PN.Lmg)?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹ Sebelum menulis penelitian ini, penulis lebih dahulu melihat dan membaca karya-karya ilmiah sebelumnya, yang berupa buku, jurnal, penelitian skripsi dan sebagainya. Memang telah sering muncul penelitian yang bertemakan pencurian, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dari segi pembahasannya. Begitupun penelitian yang penulis tulis ini tentunya juga berbeda. Penelitian-penelitian sejenis yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: Nomor 34/Pid/2011/PN.MKD)”. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang di tulis penulis adalah terletak pada sifat penelitiannya. Skripsi karya mahasiswa uin Syarif Hidayatullah yang bernama Arif Setiawan ini bersifat deskriptis analisis sedangkan skripsi yang di tulis penulis ini bersifat deskriptif deduktif. Kasus pada skripsi tersebut adalah tindak pidana pencurian saat terjadi bencana alam yang

⁹ Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa. 2013. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* ..., hal. 8

2. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid”. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi IAIN Walisongo ini juga sangat berbeda dengan skripsi penulis. Skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana pencurian kotak amal masjid yang terkandung dalam putusan bernomorkan No.465/PID.B/2010/PN.Smg sedangkan skripsi penulis membahas mengenai tindak pidana pencurian spet pertanian yang terkandung dalam salah satu putusan pengadilan negeri Lamongan. Berdasarkan jenisnya, pencurian kotak amal masjid juga masuk ke dalam pencurian dengan pemberatan, tentunya berbeda dengan kasus pencurian spet pertanian yang termasuk ke dalam pencurian biasa. Hukuman bagi terdakwa tindak pencurian dengan pemberatan adalah kurungan paling lama tujuh tahun, sedangkan untuk pencurian biasa maksimal hanya lima tahun. Dari sini kita dapat melihat perbedaan

[illegible]

3. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 193/Pid. B/ 2013/PN.Sda)”. Skripsi dari seorang mahasiswa yang bernama Faiza Wahyuni yang berasal dari jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang ditulis pada tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deduktif analisis yang mana akan menghasilkan analisa penelitian bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tetap dihukum tetapi hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman yang seharusnya dijatuhkan dengan alasan dianggap masih dibawah asuhan orangtua dan hakim hanya memberikan efek jera terhadap anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan menurut hukum pidana islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena tidak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur balig. Dan kadi hanya akan menegur kesalahannya dan akan dikembalikan kepada orangtuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan.¹²

¹²Faiza Wahyuni (03207018), "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang

G. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pembaca maupun bagi diri sendiri baik secara teori maupun prakteknya dalam masyarakat.

1. Kegunaan teoritis, yaitu secara teori apa yang dihasilkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam ilmu hukum. Sehingga bisa menjadi bahan referensi untuk kajian-kajian hukum selanjutnya.

[illegible]

2. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana Islam.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu definisi atau pengertian dari tiap-tiap variable yang ada dalam penelitian ini. Yang mana hal ini berguna untuk memudahkan penulis dalam mengkaji atau mengukur variabel tersebut dalam proses ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashtar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹³

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002)

- ¹⁴Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 71.

[illegible]

- 1) Abdul Qadir Audah. *Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu)
- 2) Ahmad Hanafi. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang)
- 3) Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Cv Pustaka Setia)
- 4) <http://maaymeong.blogspot.com/2014/10/pengertian-fungsi-tujuan-jenis-serta.html>. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 08.00
- 5) Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- 6) Kansil. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Balai Pustaka)
- 7) Nabban Husain. 1984. *Tarjamah Fiqh Sunnah*. (Bandung :PT. Al-Ma'arif)
- 8) Mukti Ari. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v, (Yogyakarta:Pustaka)
- 9) Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- 10) Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)

b. Data Skunder yaitu data sampingan yang diambil dari media cetak, media elektronik, maupun media online yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian spet pertanian.

Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan atau mendapatkan data sesuai dengan masalah yang dikaji disebut dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti

- a. Proses edit dan penyuntingan data yaitu mengumpulkan dan mendapatkan data sebanyak-banyaknya mengenai tema yang dikaji kemudian akan di sunting sesuai data yang memang dibutuhkan untuk penelitian ini.
- b. Proses penyusunan data yaitu menyusun data yang telah di sunting tadi sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.
- c. Proses analisis data yaitu proses terakhir dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan di susun, penulis harus menganalisis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

[illegible]

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka diperlukan sistematika yang runtut seperti di bawah ini:

Bab kedua, berisi tentang teori-teori para ahli sebagai penguat konsep-konsep pada penelitian ini.

Bab keempat berisi tentang analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa (Dalam Putusan Pengadilan negeri Lamongan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Lmg) dan analisis tinjauan dari hukum pidana Islam.

[illegible]

KONSEP *SARIQAH* (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian *Sariqah* (Pencurian)

Tindak pidana pencurian atau biasa dikenal dengan *sariqah* yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.²

³ 21Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV PustakaSetia, 2000), h.99.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Yang mana pelaku memiliki niat tidak baik ketika mengambil barang tersebut dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, contohnya mengambil barang dari mobil seseorang yang ditinggal, dan lain sebagainya.²

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian itu dibagi menjadi dua:

Syarat pencurian dapat dikatakan sebagai pencurian kecil yaitu apabila ada orang yang mengambil harta kekayaan orang lain tanpa disadari oleh korban dan dilakukan dengan tanpa izin. Jika salah satu dari kedua unsur tersebut terpenuhi, maka hal ini bukan termasuk pencurian kecil. Misalkan ada orang yang mengambil harta milik orang lain dengan tanpa kekerasan dan juga orang yang memiliki harta tersebut mengetahuinya, maka

² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: GemaInsani, 2003), h. 28.

b. Pencurian Besar

3. Unsur-unsur *Sariqah* (Pencurian)

³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT.Kharisma Ilmu), h. 181.

[illegible]

- b) Harta atau benda yang telah diambil dari tempat penyimpanan tersebut telah dibawa keluar dari kuasa pemilik. Misalkan benda tersebut berada pada sebuah almari di dalam rumah, kemudian si pencuri hanya mengeluarkan benda tersebut dari almari tetapi masih di dalam rumah, maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai pencurian yang harus dihukum *had*.

- ⁵ Muhammad Amin Suma.2001. *Pidana Islam di Indonesia*.(Jakarta :Pustaka Firdaus), h.115
⁶ Ibid, h. 119

Seseorang yang telah mengetahui bahwa mencuri atau mengambil harta orang lain itu dilarang tetapi masih sengaja melakukan, maka dia dianggap sebagai pencuri dan akan mendapatkan hukuman had.

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Pengertian tindak pidana secara bahasa yaitu sebutan bagi perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang.⁸ Sedangkan secara istilah adalah sebutan untuk segala perbuatan yang haram menurut syari'at agama Islam.⁹

⁹ Ibid., 78.

¹² Mardani, Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dikatakan jarimah hudud adalah suatu tindak pidana yang hukumannya telah ada dan dalam syari'at. Hal ini menjadi hak Allah dalam menentukannya. Tidak ada batasan terendah maupun tertinggi dalam Had, begitu juga seorang korban atau masyarakat tidak akan bisa mewakili atau menghapuskan hukuman bagi pelaku tersebut.

- 1) Nash tentang bagaimana tindakan manusia yang benar ketika makan, minum, menikah, bercerai dan sebagainya.
- 2) Aturan sanksi bagi manusia yang melakukan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah.

a) Sanksi yang berhubungan dengan tubuh atau fisik pelaku. Yang termasuk dalam sanksi ini adalah dihukum mati, memotong tangan pelaku, hukuman cambukan, dan hukuman rajam sampai mati.

¹⁷ Ibid., 14.

c) Pelaku tindak pidana dituntut untuk membayar sejumlah uang sebagai denda.

b. Jarimah Kisas dan Diat

Secara bahasa, kisas adalah balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Sehingga jika ada orang yang dengan sengaja membunuh atau menghilangkan anggota tubuh orang lain maka hukumannya harus sama dengan apa yang dilakukan.¹⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

¹⁹ Rahmad Hakim. *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. PustakaSetia, 2000),29.

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.

Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.²⁰

c. Jarimah takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.

Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu hukuman yang

²⁰ Moh.Rifai. *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim* (Semarang: CV WIDYA KARSA PRATAMA, 1993).185.

Takzir transliterasinya ta‘zir bentuk masdar dari kata – ‘azara-ya’ziru yang secara etimologis berarti وَالْمَنْعُ الرَّدُّ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَ menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surah Alfath Ayat 9 :

Artinya: 9. supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.²²

Akan tetapi menurut Imam Mawardi, Pengertian takzir yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.²³

Dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri atau orang yang berwenang, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman tersebut, penguasa hanya

²³ Ahmad Mawardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 19.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', sehingga tidak ada batas minimal dan maksimalnya.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak orang yang berwenang atau ulil amri. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Oleh karena itu yang termasuk jarimah ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Jarimah takzir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada uli al-amri juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syara` yaitu jarimah hudud akan

Berikut ini macam-macam jarimah takzir yaitu sebagai berikut :²⁵

- a) Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu hadits yang artinya : "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
- b) Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu hadits yang artinya : "Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya." (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)

2) Jarimah hudud atau kisas–diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* ...,143.

4) Jarimah yang ditentukan oleh al-amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan money laundering.

1) Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :

- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :

- 3) Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :

- ²⁶ Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

- b) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
- 4) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
 - a) Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b) Kecurangan dalam perdagangan.
 - c) Gasab (meminjam tanpa izin).
 - d) Pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 5) Gangguan keamanan, di antaranya :
 - a) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 6) Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya :
 - a) Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b) Spionase (mata-mata).
 - c) Membocorkan rahasia negara.
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :
 - a) Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b) Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zahiri, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah aidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

Ulama Syafii berpendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat

Dalam menjelaskan hukuman kejahatan terhadap harta benda, para ulama fiqh membaginya ke dalam dua kategori.²⁹

- ²⁸ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika), h. 99

[illegible]

Hukuman had untuk pencurian yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah adalah hukum potong tangan.³⁰ Sumber pokok yang menjadi landasan hukuman had pencurian adalah Surat Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ
 اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS al-Maidah:38)³¹

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya
dijatuhkan jika terpenuhi syarat :

- 1) Orang yang mencuri telah baligh
- 2) Orang yang mencuri berakal (tidak gila)
- 3) Tidak ada keterpaksaan
- 4) Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam
- 5) Mengambil harta benda sebanyak 1 nisab (kira-kira 1/4)

dinar) yaitu $\frac{1}{4}$ dinar = 3 dirham, sedangkan 1 dinar = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, berarti 1 dinar = $12 \times 1,12$ gram emas = 13,44 gram emas, jadi $\frac{1}{4}$ dinar = $13,44 : 4 = 3,36$ gram emas.³²

- 6) Mengambil dari tempat penyimpanan harta benda

³⁰ H. Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), h. 90

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman.2007. (Bogor :Departemen Agama RI) , h. 114

³² Sudarsono.1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta), h.546

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.³⁴

Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulul Amri. Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan batas pemotongannya, para ulama berbeda pendapat.

³³ Wahbah Zuhaili.2008. *Fiqh Imam Syafi'I*(Jakarta : PT. Niaga Swadaya), h. 297

[illegible]

2) Atha berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya, dan mencuri yang kedua kalinya dihukum ta'zir.

4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada pencurian pertama pencuri dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, pencurian ketiga dipenjara sampai tobat.

[illegible]

Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah Selatan, kabupaten Gresik di sebelah Timur dan Kabupaten Tuban serta Kabupaten Bojonegoro di sebelah Barat.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan *hukum acara* yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf.

Ketua : Muhamad Sainal, SH, M.Hum

Wakil Ketua : Agus Akhyudi, SH, M.H

Hakim :

- M. Aunur Rofiq, SH
- Ery Acoka Bharata, SH, SE, MM
- Agusty Hadi Widarto, SH
- Jantiani Longli Naetasi, SH

Sekretaris : Drs. Subaki

Panitera : H. Raden Wiyono, SH, MM

[illegible]

1. Biodata Terdakwa

Nama lengkap : Kharisun Arif Bin Asro

Tempat lahir : Gresik

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/05 Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

2. Kronologi Kasus

Dari putusan pengadilan negeri Lamongan No. 180/Pid.b/2019/PN.Lmg ini terungkap bagaimana terdakwa Kharisun Arif bi Asro mendapatkan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya yakni “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa Kharisun Arif termuat dalam KUHP pada pasal 362 pasal 53 ayat 1. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- [illegible]

- 2) Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di warung kopi milik saudara Cocok (nama panggilan) kemudian melihat Terdakwa yang mencurigakan disekitar warung dan berjalan kearah kandang ayam milik Saksi. Saksi membuntuti Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke kandang ayam dengan cara memanjat pohon kerek dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver yang ada di dalam kandang ayam Saksi. Selanjutnya, Terdakwa keluar melalui jalan yang dilalui sebelumnya, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dan Saksi menghubungi Saudara Cocok untuk menghadang Terdakwa di sebelah barat kandang ayam. Setelah jarak 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa menyadari dan membuang spet yang dibawanya ke sawah. Kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Arif.
- 3) Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika mengambil spet di kandang ayam milik Saksi.
- 4) Bahwa kandang ayam milik Saksi dalam keadaan sepi dan berpagar.
- 5) Bahwa spet milik Saksi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

8) Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sutari untuk menghadang disebelah barat kandang ayam karena ternyata pelaku sudah masuk dalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver di dalam kandang ayam kemudian dibawa kearah barat, setelah ditunggu tidak keluar akhirnya Saksi Sutari datang dan mengatakan bahwa yang mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver di dalam kandang ayam adalah Terdakwa Kharisun Arif.

10) Bahwa Terdakwa belum ada izin dari Saksi Sutari untuk mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver.

Di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sutari berupa 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver.
- 2) Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sutari pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah kandang ayam milik Saksi Sutari di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan
- 3) Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika mengambil spet di kandang ayam milik Saksi Sutari
- 4) Bahwa pada awalnya Terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari lalu setelah kondisi sepi kemudian Terdakwa masuk dalam kandang ayam tersebut dengan memanjat pohon keres untuk bisa masuk dalam halaman kandang ayam, kemudian saat didalam Terdakwa melihat spet pertanian di dalam kandang ayam sebelah utara, selanjutnya Terdakwa membuka dinding dari kayu pring kemudian mengambil spet tersebut setelah itu Terdakwa bawa ke arah selatan dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang namun baru berjalan 25 meter sudah diketahui oleh pemilik barang kemudian barang dibuang ke sawah dan Terdakwa melarikan diri.
- 5) Bahwa Terdakwa menuju ke lokasi kandang ayam milik Saksi Sutari dengan berjalan kaki.
- 6) Bahwa spet yang diambil oleh Terdakwa rencananya akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun perbuatan terdakwa Kharisun arif didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Kharisun Arif Bin Asro, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- [illegible]

2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang

[illegible]

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari yang berada di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Saksi Sutari yang melihat terdakwa kemudian curiga dan mengawasi Terdakwa. Melihat keadaan disekitar kandang yang sepi, Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara memanjat pohon keres dan membuka pagar yang terbuat dari kayu. Di dalam kandang ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver, kemudian Terdakwa mengambil spet tersebut dan dibawa pulang. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sutari untuk masuk ke dalam kandang ayam dan tidak mempunyai izin untuk mengambil spet milik Saksi Sutari. Saksi Sutari yang telah mengawasi Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Cocok untuk menghadang Terdakwa dari arah barat. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah diketahui Saksi Sutari kemudian membuang spet yang telah diambilnya ke sawah. Saksi Sutari menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitasnya kemudian Terdakwa mengaku bernama Arif. Saat Saksi Sutari lengah Terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toeigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*).

Berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari yang berada di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

Saksi Sutari yang melihat Terdakwa kemudian curiga dan mengawasi Terdakwa. Melihat keadaan disekitar kandang yang sepi, Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara memanjat pohon keres dan membuka pagar yang terbuat dari kayu. Didalam kandang ayam, terdakwa melihat 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver, kemudian Terdakwa mengambil spet tersebut dan dibawa pulang.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sutari untuk masuk ke dalam kandang ayam dan tidak mempunyai izin untuk mengambil spet milik Saksi Sutari. Saksi Sutari yang telah mengawasi terdakwa kemudian menghubungi Saksi Cocok untuk menghadang Terdakwa dari arah barat. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah diketahui Saksi Sutari kemudian membuang spet yang telah diambarnya ke sawah. Saksi Sutari menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitasnya kemudian Terdakwa mengaku bernama Arif. Saat saksi Sutari lengah terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Sebelum masuk ke dalam kandang ayam milik saksi Sutari, terdakwa melihat-lihat situasi disekitar kandang ayam, yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver milik Saksi Sutari dan dibawa pulang oleh terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan

perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian kesengajaan dengan maksud.

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver milik Saksi Sutari dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana terdakwa saat mengambil spet tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Sutari yang merupakan pemilik dari barang tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa, akan tetapi sebelum itu harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek yang dapat meringankan dan memberatkan kasus tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah berulang kali mengambil barang milik orang lain.
2. Terdakwa merugikan pemilik barang.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan.

Setelah proses panjang akhirnya majelis hakim pengadilan negeri Lamongan mengeluarkan amar putusannya. Hal ini dilakukan setelah adanya pertimbangan dari segi hakim mempertimbangkan berbagai aspek, yuridis, filosofis dan sosiologis. Amar putusan tersebut berbunyi :

- [illegible]

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 180/PID.B/2019/PN.LMG TENTANG TINDAK
PIDANA PENCURIAN SPET PERTANIAN**

Hakim merupakan seseorang yang bertugas untuk memutuskan sebuah perkara. Seorang hakim harus memiliki pertimbangan yang baik dan teliti sehingga putusannya tidak akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Putusan hakim dianggap sebagai nilai hukum yang adil dan mengandung kepastian hukum karena dilakukan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek.¹

¹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke 5 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar : 2004), hlm. 140

58

Dari sedikit uraian di atas, dapat dipastikan kasus ini sangat cocok untuk di gali untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa dalam putusan pengadilan negeri Lamongan yang bernomorkan 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg ini. Sebelum membahas lebih jauh, seperti yang kita ketahui tindak pencurian merupakan pelanggaran hukum pidana dan telah diatur dalam undang-undang KUHP pasal 362 sampai 367.

Pasal-pasal tersebut dibedakan menurut jenis pencuriannya. Adapun perinciannya adalah:

“Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Dalam mengambil putusan, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam sebuah tindakan pidana. Kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Kharisun Arif telah memenuhi beberapa unsur tersebut sehingga Hakim Pengadilan mengambil putusan pemidanaan. Unsur-unsur yang telah dipenuhi yaitu:

- [illegible]

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 180/Pid.b/2019/PN.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian

[illegible]

1. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi

Mengambil secara sembunyi-sembunyi artinya seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin, contohnya seseorang mengambil barang di mobil orang lain yang ditinggal pemiliknya, dalam kasus ini Kharisun Arif bin Asro pada bulan Februari 2019 telah diam-diam mengambil spet pertanian merk SWAN warna silver yang ada di kandang ayam milik saksi Sutari. Kandang ayam tersebut berada di desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

- a. Harta/benda telah dikeluarkan dari tempatnya.
- b. Harta/benda yang diambil telah berpindah tangan dari pemiliknya.
- c. Harta/benda yang diambil telah berpindah tangan ke pencuri.

2. Barang yang diambil berupa harta yang berharga

Di dalam kasus ini terdakwa belum sempat menikmati hasil dari barang curiannya, harta yang dicuri belum mencapai satu nisab pencurian. Jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hambali berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari atau tiga dirham syari murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar. Sudah diketahui bersama, bahwa menurut mereka, satu dinar adalah

3. Harta yang dicuri itu milik orang lain

4. Ada itikad tidak baik

Buti yang harus dipenuhi untuk menganggap sebuah tindakan termasuk tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

Saksi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
isun Arif tidak lain adalah Sutari sebagai korban dan temannya
bernama Martinus George Lasut Rachman Alias Cokok

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya

Dalam putusan yang dikaji penulis, terdakwa Kharisun Arif bin Asro dalam kasus tersebut mengakui perbuatannya dan berterusterang dalam memberikan keterangan di persidangan.

3. Dengan Sumpah

Sumpah merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam kasus tindak pidana. Akan tetapi dirasa kurang kuat jika tindak pidana yang dimaksud adalah kasus pencurian. Dibutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi agar tidak menjerumuskan dan menjatuhkan hukuman pada kasus pencurian. Selain dengan alat bukti tersebut, diperlukan pertimbangan hukum untuk menentukan hukuman yang pantas.

bahan pertimbangan hukum untuk menentukan huku terdakwa pencurian dapat diambil dari alat bukti yang pengakuan dari terdakwa itu sendiri.

Setelah melalui persidangan dan dengan memperti berbagai aspek dari segi bukti dan saksi maka akhirn memberikan hukumannya kepada terdakwa Kharisun Ari yang telah melakukan pencurian di kandang ayam milik s

Dasa Nogoistisari Koo, Sembang Keb, Lamongan berup

Desa Nogojatisari Kec. Sambeng Kab. Lamongan berupa

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 67

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Kharisun Ariyanto berdasarkan putusan Nomor. 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg telah sesuai dengan takzir dalam hal ini dikarenakan tindakan pencurian yang dilakukan memenuhi rukun sariqah pada nisab pencuriannya. Sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan. Dalam kasus ini termasuk takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan badan di penjara, adapun hukuman takzir diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini uli al-amri atau hakim berpegang sesuai pada ketentuan yang berlaku.

sedikit banyak masyarakat harus faham mengenai hukum pidana kaitannya dengan hukum pidana Islam.

Mardani. 2010.*Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*.(Jakarta : Sinar Grafika)

Nadhifuddin, Ahmad.2009. *Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern*. (Surabaya : Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya)

Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Shari'ah Islam* (Jakarta: PT. RinekaCipta)

Rosyada, Dede. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan)

[illegible]

